



**Badan Pendapatan Daerah
Kota Bontang**

**RENCANA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BONTANG
TAHUN 2022**

Alamat: Jl. MH. Thamrin RT.05 Kelurahan Gunung Elai, Kode Pos 75311

KATA PENGANTAR

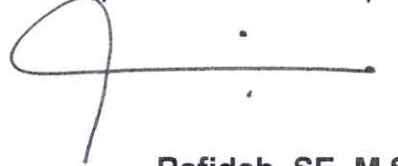
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan petunjukNya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2022.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah ini akan dijadikan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah tahun 2022. Diharapkan Rencana Kerja ini dapat dijadikan sarana dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa yang akan datang oleh para pimpinan dan seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Dengan segala keterbatasan dalam penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan Rencana Kerja ini. Semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan khususnya sektor Pendapatan Daerah di Kota Bontang.

Bontang, November 2021

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah



Rafidah, SE., M.Si

NIP. 197003232001122003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi..... ii

Daftar Tabel iii

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika dan Penulisan..... 5

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah 9

2.2 Analisis Kinerja Bapenda Kota Bontang..... 15

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan
Pendapatan Daerah Kota Bontang..... 17

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 22

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 29

Bab III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 30

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 31

3.3 Program dan Kegiatan 32

Bab IV PENUTUP 36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Bapenda Sampai dengan Tahun 2021	10
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapenda Kota Bontang	16
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan	29
Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Bapenda Kota Bontang	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJMD dan RKPD. Oleh karena itu, OPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan OPD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan OPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bontang melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022

Renja Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Renja BAPENDA mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BAPENDA Kota Bontang Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Bontang Tahun 2022.

Renja BAPENDA dijadikan dasar sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan BAPENDA Kota Bontang tahun 2022 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kota Bontang khususnya dan Nasional pada umumnya.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang disusun berlandaskan pada :

- 1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
- 2) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
- 3) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RJP) Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
- 5) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);

- 6) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
- 7) Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 8) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124;
- 10) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 11) Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011

Tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 14) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2025 Kota Bontang.
- 15) Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kota Bontang.
- 16) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Badan Pendapatan Tahun 2022 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2022 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menjadi dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang pada tahun 2022
2. Merumuskan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
3. Merumuskan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang.

1.4 Sistematika dan Penulisan

Penyusunan Rencana kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah ini secara garis besar terdiri dari 4 (Empat) bab, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan latar belakang penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Memuat sistematika Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang 2022.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Kota Bontang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bapenda Kota Bontang

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang tahun lalu (tahun 2020) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2021); Menjelaskan pencapaian target Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang tahun-tahun sebelumnya; Melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang tahun lalu, dan realisasi Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang dan/atau realisasi APBD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Menjelaskan capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang berdasarkan indikator yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Menjelaskan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang yang meliputi pelayanan, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala

daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan..

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD berisikan telaahaan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD
- 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA BAPENDA, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPENDA yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra BAPENDA.

- 3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 , diperlukan hasil evaluasi Kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan perkiraan capaian di tahun 2021 Serta capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang tahun 2021.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang disajikan pada tabel 2.1 berikut

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Bapenda

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Tahun 2019-2021	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program(output) / Kegiatan (outcome)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target(Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	7 = (6/5)	8	9 = (4+6-8)	10 = (9/3)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran								
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Menyurat	Jumlah Bulan	3750 lembar	1250 lembar	1250 lembar	100%				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah materai								
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%		1250 lembar	3.750 lembar	100%
		Jumlah Non PNS dan Tenaga Kebersihan	36 orang 4 orang					36 orang 4 orang	36 orang 4 orang	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Kendaraan	94 unit	47 unit	45 unit	96%		0 unit	92 unit	98%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Terpeliharanya kebersihan kantor	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%		0 bulan	24 bulan	100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah alat tulis kantor	56 item	28 item	30 item	107%		0 item	58 item	104%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Penyediaan Penggandaan dan Cetak	75 item	3 item	25 item	104%		30 item	59 item	79%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan kantor	60 item	20 item	20 item	55%		20 item	51 item	85%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	27 item	9 item	9 item	133%		9 item	30 item	111%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	1.188 eksemplar	396 eksemplar	396 eksemplar	400%		396 eksemplar	2.376 eksemplar	200%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yg tersedia	60 item	10 item	10 item	230%		20 item	53 item	88%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi atau Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas	44 kali	- kali	0 kali	-		44 kali	44 kali	100%
Penyediaan Makanan dan Minuman		Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kegiatan yang disediakan	8.500 kotak	12.700 kotak	4500 kotak	100%		0 kotak	17.200 kotak	202%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	250 kali	216 kali	138 kali	110%		0 kali	354 kali	142%
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran		Jumlah bulan pembayaran tenaga administrasi	72 orang	27 orang	36 orang	100%		0 orang	63 orang	88%
Penataan Kearsipan Kantor		Administrasi dan Dokumen	4 item	2 item	3 item	150%		0 item	5 item	125%

Rencana Kerja Bapenda Tahun 2022

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Tahun 2019-2021	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program(output) / Kegiatan (outcome)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	7 = (6/5)	8	9 = (4+6+8)	10 = (9/3)
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	- Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan RENSTRA dan RENCANA	1 dokumen	- Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP								
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur								
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Jumlah kendaraan	30 unit	9	9 unit	1 unit	11%	0 unit	10 unit	33%
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional										
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100%	5 jenis	15 jenis	100%
Pengadaan Meubelair	Pengadaan Meubelair	Telaksananya Kegiatan Pengadaan Meubelair								
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	100%	1 gedung	1 gedung	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung yang Dipelihara	5 jenis	- jenis	0 jenis	0 jenis	-	5 jenis	5 jenis	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Kendaraan	34 unit	- unit	0 unit	0 unit	-	34 unit	34 unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Service, Pengganti suku cadang BBM dan Pelumas Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diperbaiki	94 unit	47 unit	47 unit	34 unit	72%	0 unit	81 unit	86%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diperbaiki	25 jenis	20 jenis	15 jenis	9 jenis	60%	0 jenis	29 jenis	116%
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		Tingkat pelayanan administrasi perkantoran								
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian kegiatan hari hari tertentu	312 stel	75 stel	75 stel	262 stel	349%	162 stel	499 stel	160%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	5 orang	- orang	0 orang	0 orang	-	5 orang	5 orang	100%

Rencana Kerja Bapenda Tahun 2022

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Tahun 2019-2021	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah, Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program(output) / Kegiatan (outcome)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	7 = (6/5)	8	9 = (4+6-8)	10 = (9/3)
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tiugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	5 orang	- orang	0 orang	0 orang	-	5 orang	5 orang	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat daerah								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	41 org	- orang	0 orang	0 orang	-	41 orang	41 orang	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	- Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	- Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur								
Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah Pegawai yang ikut Pendidikan dan Pelatihan	100 orang	50 orang	15 orang	5 orang	33%	0 orang	55 orang	55%
Penyusunan RAPERDA		Tersusunnya dokumen RAPERDA	1 dokumen	0 orang	1 Dokumen	4 Dokumen	400%	0 dokumen	4 dokumen	400%
PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH		Terpublikasinya informasi pembangunan daerah								
Publikasi Kegiatan Pembangunan		Publikasi Kegiatan Pembangunan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	0 bulan	24 bulan	100%
PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)								
Jasa Penyampaian SPPT PBB oleh RT melalui Kelurahan		Jumlah SPPTD PBB kepada wajib pajak PBB Sektor Perkotaan secara optimal	110200 Lembar	38.000 Lembar	38000 Lembar	37524 Lembar	99%	0 lembar	75.524 lembar	69%
Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan		Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan	2 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	0 tahun	2 tahun	100%
Pemeliharaan SISMOP PBB		Terawatnya SISMOP PBB	2 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	0 Aplikasi	2 Aplikasi	100%
Penyusunan Nilai Zona Tanah (ZNT)		Dokumen Nilai Zona Tanah	1 Dokumen	- Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
Pelaksanaan Pemungutan dan Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan		Jumlah Objek PBB yang telah dipungut dan dimonitoring	85000 objek	33.000 objek	45.000 objek	33.000 objek	73%	0 Objek	66.000 Objek	78%
Gebyar Pajak Daerah		Terlaksananya gebyar pajak daerah	2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	0 kegiatan	2 kegiatan	100%
Asosiasi Daerah Penghasil Migas		Keikutsertaan kota Bontang dalam Asosiasi Daerah Penghasil Migas	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 tahun	100%	0 Tahun	2 Tahun	200%
Pengembangan Database Profil Pajak Potensi Pajak Dawrah dan Retribusi Daerah		Jumlah database profil pajak daerah dan retribusi daerah	1 Aplikasi	- Aplikasi	1 Aplikasi	0 Aplikasi	0%	0 Aplikasi	0 Aplikasi	0%
Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah		Terlaksananya Rakor Pendapatan Daerah	4 kali	- kali	4 kali	0 kali	0%	0 kali	0 kali	0%

Rencana Kerja Kerja Bapenda Tahun 2022

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Tahun 2019-2021	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program(output) / Kegiatan (outcome)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	8	9 = (4+8)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	10 = (9/3)
1	2	3	4	5	6	7	7 = (6/5)	8	9 = (4+8)	10 = (9/3)	
Penyusunan Roadmap PAD untuk kemandirian fiskal daerah Kota Bontang		Tersusunnya Roadmap untuk kemandirian fiskal daerah	1 Dokumen	- Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0%
Orientasi Pengembangan Pajak Daerah		Terlaksananya orientasi pengembangan pajak daerah	1 Kegiatan	- kegiatan	1 kegiatan	0 kegiatan	0%	0 kegiatan	0 kegiatan	0%	0%
Pengembangan Sistem Monitoring dan Pengendalian Operasional Wajib Pajak berbasis Web Services		Tersedianya peralatan pencatatan pajak daerah	100 unit	- unit	100 unit	0 unit	0%	0 unit	0 unit	0%	0%
Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Terlaksananya Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	3 Kecamatan	- kecamatan	3 Kecamatan	3 kecamatan	100%	0 Kecamatan	3 Kecamatan	100%	100%
Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah		Tersedianya SOP dan Pengelolaan	1 Dokumen	- Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0%
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah		Persentase pajak daerah terhadap pendapatan asli Daerah	200 objek pajak	100 objek pajak	100 objek pajak	100 objek pajak	100%	0 Objek pajak	200 Objek pajak	100%	100%
Pemeliharaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPATDA)		Jumlah aplikasi yang dipelihara	2 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	0 Aplikasi	2 Aplikasi	100%	100%
Gathering Wajib Pajak		Jumlah wajib pajak yang aktif membayar pajak	50 WP	- WP	50 WP	0 WP	0%	0 WP	0 WP	0%	0%
Validasi Wajib Pajak		Jumlah objek pajak baru	100 Objek pajak	- objek pajak	100 Objek	0 Objek	0%	0 Objek	0 Objek	0%	0%
Pengaruh Media Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah		Jumlah data WP	1000 WP	- WP	1000 WP	0 WP	0%	0 WP	0 WP	0%	0%
Penyusunan naskah akademik RAPERDA		Tersedianya dokumen pengaruh media terhadap peningkatan PAD	1 Dokumen	- Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0%
Collecting data dan penyusunan profil wajib pajak		Tersedianya dokumen naskah akademik RAPERDA	1 Dokumen	- Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0%
Penyusunan Buku Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Jumlah profil yang disusun	150 WP	- WP	100 WP	0 WP	0%	150 WP	0 WP	0%	0%
Penghapusan Pajak Daerah		Tersedianya Buku Peraturan Pajak Daerah	500 Buku	- buku	500 Buku	0 Buku	0%	0 Buku	0 Buku	0%	0%
		Terlaksananya Penghapusan Pajak Daerah	134 WP	- WP	134 WP	134 WP	100%	0 WP	134 WP	100%	100%
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli daerah		-							
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah									
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		Terlaksananya Agenda Tahunan ADPM dan FDPM	2 kegiatan	- kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	-	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	100%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli daerah		-							
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Tercapainya Target pendapatan asli daerah									
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Tersusunnya kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah	6 media	- media	0 media	0 media	-	6 media	6 media	100%	100%

Rencana Kerja Bapenda Tahun 2022

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Tahun 2019-2021	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program(output) / Kegiatan (outcome)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	7 = (6/5)	8	9 = (4+6+8)	10 = (9/3)
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 jenis	- jenis	0 jenis	0 jenis	-	5 jenis	5 jenis	100%
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Aplikasi	5 aplikasi	- Aplikasi	0 Aplikasi	0 Aplikasi	-	5 aplikasi	5 Aplikasi	100%
	Penilaian Pajak dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta BPHTB	Terlaksananya Penilaian PBBP2 serta BPHTB	1 dokumen 30 orang	- Dokumen - orang	0 Dokumen 0 orang	0 Dokumen 0 orang	-	1 dokumen 30 orang	1 dokumen 30 orang	100%
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak	200 WP	- WP	0 WP	0 WP	-	200 WP	200 WP	100%
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak PBB, Penyampaian dan Validasi Data PBB	100.000 WP	- objek pajak	0 objek pajak	0 objek pajak	-	100.000 WP	100.000 WP	100%
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah WP yang Diperiksa	150 WP	- WP	0 WP	0 WP	-	150 WP	150 WP	100%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Review Renstra		Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Administratif		-						
Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Prognosis Anggaran		Jumlah Dokumen Renstra	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah Laporan Keuangan Semester dan Prognosis Anggaran	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	0%	1 Dokumen	2 Dokumen	67%
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	0%	1 Dokumen	2 Dokumen	67%
Penyusunan Renja OPD		Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah Dokumen Renja	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

2.2 Analisis Kinerja Badan Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Bontang

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2019	2020	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%	9,5%	9,6%	9,65%	-8,66%	3,23%	3,29%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

Untuk menetapkan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, langkah pertama yang dilakukan dengan memetakan interaksi antara faktor lingkungan internal dengan lingkungan eksternal melalui proses memadukan faktor-faktor internal dengan faktor-faktor eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Dalam kaitan dengan penentuan isu-isu strategis tersebut, maka langkah-langkah yang akan ditempuh adalah dengan melakukan Identifikasi Permasalahan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga sebagai Satuan Kerja di bidang pengelolaan pendapatan daerah, terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menjadi kendala pelayanan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.3.1. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan PAD, maka berikut adalah permasalahan yang dihadapi, baik dari sisi internal maupun eksternal, sebagai berikut:

1. Kuantitas SDM aparatur yang belum memadai masih di bawah kebutuhan riil pelaksanaan beban kerja;
2. Belum ditetapkannya Standar Pelayanan Minimum (SPM);
3. Kebijakan mutasi (penempatan) pegawai kurang memperhatikan kuantitas dan kualitas (kompetensi) aparatur. Lebih spesifik tentang

teknis Pendapatan Daerah, teknis pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah dan aset daerah;

4. Belum optimalnya pembinaan secara administrasi dan teknis bagi petugas pemungut pajak, bendaharawan OPD dan PPK-OPD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
5. Subyek/Obyek pajak daerah sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah belum digali secara optimal;
6. Masih banyaknya potensi wajib pajak (WP) yang belum terdaftar serta rendahnya wajib pajak (WP) yang sudah terdaftar
7. Penyaluran Dana Bagi Hasil Perimbangan Keuangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak oleh Pemerintah Pusat ke kas daerah Kota Bontang, tidak tepat waktu
8. Adanya Kebijakan Regulasi yang berpengaruh pada penerimaan daerah

2.3.2 Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan

Dalam menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi target dan capaian kinerja Organisasi Bapenda Kota Bontang dapat diketahui dengan melakukan analisis dengan metode **SWOT** (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*).

1. Lingkungan Internal

- **Kekuatan (Strength)**
 - Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

sebagai dasar Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang;

- Adanya Produk Hukum berupa Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Bontang, sebagai dasar dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, maka acuan dasar hukum yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai petunjuk teknis yang mengatur tentang system administrasi dalam pengelolaan PAD, maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah/Badan Legislatif Daerah sebagai Dasar Hukum penyelenggaraan pemungutan Pajak/Retribusi Daerah;
- Aspek sumber daya manusia yang berkualitas dengan latar belakang sesuai dengan analisis jabatan, yang merupakan kekuatan dan dapat meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah maupun pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak;
- Tersedianya anggaran/dana yang memadai yang bersumber dari APBD untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang;
- Tersedianya sistem informasi tentang pajak daerah sehingga optimalisasi pengelolaan data pendapatan daerah dapat terwujud.
- Tersedianya gedung yang representative dan dilengkapi dengan peralatan memadai menjadikan kekuatan di bidang sarana/prasarana.

- **Kelemahan (Weakness) :**

- Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) di bidang Pendapatan Daerah yang belum memadai khususnya dalam hal Pajak Daerah, seperti belum dimilikinya PPNS, juru penilai, auditor, juru sita, dengan kondisi jabatan fungsional tersebut sangat dibutuhkan.
- Produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Daerah, masih ada yang harus dilakukan revisi sesuai dengan kondisi yang ada serta masih banyak mekanisme pengelolaan Pajak Daerah yang perlu ditetapkan dalam produk hukum baik berupa Perda, Perwali maupun Keputusan Walikota sehingga dapat dijadikan acuan kerja dalam upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;
- Penerapan sanksi kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran aturan masih belum bisa diterapkan sehingga memberikan peluang untuk tidak mentaati aturan yang berlaku;
- Masih terdapat potensi Pendapatan yang cukup besar, namun belum optimal dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi;

2. Lingkungan Eksternal

- **Peluang (Opportunity):**

- Dampak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dilimpahkannya beberapa Pajak Pusat dan Pajak Provinsi diantaranya BPHTB, PBB Sektor

Perdesaan dan Perkotaan serta Pajak Air Tanah. Hal ini merupakan peluang bagi peningkatan penerimaan pendapatan daerah;

- Letak geografis Kota Bontang cukup strategis di Provinsi Kalimantan Timur. Kota Bontang merupakan salah satu daerah yang memiliki objek wisata dan sebagai daerah industri berbasis kondensat yang memiliki banyak perusahaan multinasional, dapat memberikan efek peningkatan Pendapatan Daerah;
- Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif kepada Badan Pendapatan Daerah atas Pengelolaan Pendapatan Daerah di wilayah Kota Bontang;
- Kondisi sosial di Kota Bontang cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kota Bontang. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kota Bontang akan bertambah jumlah perusahaan/pengusaha yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD;
- Kemajuan teknologi informasi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik;
- Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan provinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan dan KPP Pratama, PLN, PDAM, BUMD lainnya, pengusaha, asosiasi dan tokoh masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat lebih baik.

- **Ancaman (Threat):**

- Kesadaran masyarakat Wajib Pajak dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak daerah dengan benar masih rendah;
- Kondisi pertumbuhan ekonomi yang menurun dapat mengakibatkan penurunan pembayaran Pajak Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2022 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target dan besaran dana yang dibutuhkan.

Pada tahun anggaran 2022 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
REVIEW RANCANGAN AWAL TERHADAP RKPD TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

RANCANGAN AWAL										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)					
			Indikator Kinerja	Target				Indikator Kinerja	Target						
5 2 1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN										UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN				
5 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
5 2 1 02:01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
5 2 1 02:01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Renja Perangkat Daerah	2 dokumen	6.619.998,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Renja Perangkat Daerah	2 dokumen	6.619.998,00					
5 2 1 02:01	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1.737.500,00	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1.737.500,00					
5 2 1 02:01	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1.737.500,00	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1.737.500,00					
5 2 1 02:01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen lakip	1 dokumen	9.932.272,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen lakip	1 dokumen	9.932.272,00					
5 2 1 02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
5 2 1 02:02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN Penerima Gaji dan Tunjangan	40 orang	10.878.067.348,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN Penerima Gaji dan Tunjangan	40 orang	10.878.067.348,00					

Rencana Kerja Bapenda Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator dan Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan	Lokasi	Indikator dan Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)
			Indikator Kinerja	Target				Indikator Kinerja	Target	
5 2 1 02:02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	52.572.487,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	52.572.487,00
5 2 1 02:02	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	4.182.272,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	4.182.272,00
5 2 1 02:05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
5 2 1 02:05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	5 orang	60.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	5 orang	60.000.000,00
5 2 1 02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
5 2 1 02:06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis Komponen instalasi/Penerangan bangunan kantor	4 jenis	15.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis Komponen instalasi/Penerangan bangunan kantor	4 jenis	15.000.000,00
5 2 1 02:06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis	100.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis	100.000.000,00
5 2 1 02:06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan Logistik/Sembako	13 item	70.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan Logistik/Sembako	13 item	70.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Ilmu dan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)
			Indikator Kinerja	Target				Indikator Kinerja	Target	
5 2 1 02:06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis barang Cetak dan Penggandaan	8 item	30.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis barang Cetak dan Penggandaan	8 item	30.000.000,00
5 2 1 02:06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1200 ekslembar	8.400.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1200 ekslembar	8.400.000,00
5 2 1 02:06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah perjalanan dinas	56 kali	367.770.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah perjalanan dinas	56 kali	367.770.000,00
5 2 1 02:07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
5 2 1 02:07	5 Pengadaan Mebel	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jenis Pengadaan Mebel	2 jenis	15.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jenis Pengadaan Mebel	2 jenis	15.000.000,00
5 2 1 02:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
5 2 1 02:08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah materai	600 lembar	6.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah materai	600 lembar	6.000.000,00
5 2 1 02:08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan Tagihan Listrik, Air dan Internet	12 bulan	355.410.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan Tagihan Listrik, Air dan Internet	12 bulan	355.410.000,00

Rencana Kerja Bapenda Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator dan Kegiatan		Pagu Murni (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Pagu Indikatif (Rp.)
				Indikator Kinerja	Target							
5 2 1 02-08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah tenaga non PNS dan tenaga kebersihan	48 orang	1.894.474.800,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah tenaga non PNS dan tenaga kebersihan	48 orang		1.894.474.800,00
5 2 1 02-09	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
5 2 1 02-09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit kendaraan	33 unit	193.133.750,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit kendaraan	33 unit		193.133.750,00
5 2 1 02-09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan yang dipelihara	5 jenis	50.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan yang dipelihara	5 jenis		50.000.000,00
5 2 1 02-09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan prasarana yang dipelihara	2 jenis	15.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan prasarana yang dipelihara	2 jenis		15.000.000,00
5 2 2		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
5 2 2 02-01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					
5 2 2 02-01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Rencana Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	228.351.231,00						

Rencana Kerja Bapenda Tahun 2022

		Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Lokasi		Keuaran sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Lokasi		Keuaran sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)					
Kode		Daerah Dan Program/ Kegiatan		Lokasi		Indikator Kinerja		Target		Pagu Indikatif (Rp.)		Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Lokasi		Indikator Kinerja		Target			
5	2	4		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH														Pagu Indikatif (Rp.)			
5	2	4	02:01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah														Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Pagu Indikatif (Rp.)	
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan penyesuaian tarif pajak daerah	1 dokumen	100.000.000,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan penyesuaian tarif pajak daerah	1 dokumen	100.000.000,00								
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Sosialisasi	450 WP	163.000.000,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Sosialisasi	450 WP	163.000.000,00								
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah alat rekam transaksi pajak daerah	100 unit	543.610.844,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah alat rekam transaksi pajak daerah	100 unit	543.610.844,00								
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aplikasi yang terpelihara	4 aplikasi	200.000.000,00	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aplikasi yang terpelihara	4 aplikasi	200.000.000,00								
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBBP2) serta Bea perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Pajak yang tervalidasi	46.000 Objek pajak/10 perusahaan	2.000.000.000,00	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBBP2) serta Bea perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Pajak yang tervalidasi perusahaan	46.000 Objek pajak/10 perusahaan	2.000.000.000,00								
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Wajib Pajak yang didampingi	90 WP	50.000.000,00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Wajib Pajak yang didampingi	90 WP	50.000.000,00								

Rencana Kerja Bapenda Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	
			Indikator Kinerja	Target				Indikator Kinerja	Target		
5 2 4 02:01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyampaian PBB	46.000 Wajib Pajak	430.000.000,00	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyampaian PBB	46.000 Wajib Pajak	430.000.000,00	
5 2 4 02:01 11	Penagihan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah tunggakan 9 pajak yang terbayar	Rp. 3.567.488.103	50.000.000,00	Penagihan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah tunggakan 9 pajak yang terbayar	Rp. 3.567.488.103	50.000.000,00	
5 2 4 02:01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Wajib Pajak yang divalidasi	100 WP	150.000.000,00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Wajib Pajak yang divalidasi	100 WP	150.000.000,00	
TOTAL					18.050.000.002,00	TOTAL					18.050.000.002,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bapenda Kota Bontang serta isu-isu strategis yang dihadapi tersebut diatas, penelaahan usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan yang diakomodir dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang adalah Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

No	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/volume	catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	Kota Bontang	Jumlah informasi yang akuntable kepada masyarakat	12 Bulan	

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 memuat arah kebijakan nasional 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian, kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum dan investasi dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, yang memuat 7 (tujuh) Program Nasional meliputi : (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dengan arah kebijakan.; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan arah kebijakan yang mengurangi ketimpangan antar wilayah; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dengan arah kebijakan mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui penurunan angka kelahiran total dan memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan arah kebijakan memperkuat gerakan nasional revolusi mental; (5) memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dengan infrastruktur pelayanan dasar ; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dengan arah kebijakan pengurangan dan penanggulangan beban

pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; (7) memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, HAM dan transformasi pelayanan publik dengan arah kebijakan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi.

Kebijakan keuangan daerah sebagai salah satu kewenangan yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi salah satu instrumen penting untuk medesain dan mengarahkan kebijakan pembangunan daerah untuk meningkatkan kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Bapenda Kota Bontang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, dengan konsentrasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan memberikan jaminan ketersediaan anggaran melalui realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Renja BAPENDA mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BAPENDA Kota Bontang Tahun 2021-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Renja BAPENDA Kota Bontang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kemandirian fiskal daerah;

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Bapenda Tahun 2022 adalah sebagai berikut::

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program dan kegiatan yang dirancang Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang tahun 2022 dapat dilihat pada table 3.1 berikut :

TABEL 3.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN PRAKIRAN MAJU TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Nilai IKM Perangkat Daerah	3 Kota Bontang	4 85,5	5 14.135.037.927,00	6 Dana Umum (APBD)	7	8 86,2	9 14.417.738.684,00
	Persentase Implementasi kebijakan reformasi birokrasi		100%				100%	
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Bontang	5 Dokumen	20.027.270,00	Dana Umum (APBD)		4 Dokumen	25.383.998,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Renstra dan Renja	Kota Bontang	2 Dokumen	6.619.998,00	Dana Umum (APBD)		1 Dokumen	11.797.500,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	Kota Bontang	1 Dokumen	1.737.500,00	Dana Umum (APBD)		1 Dokumen	1.737.500,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kota Bontang	1 Dokumen	1.737.500,00	Dana Umum (APBD)		1 Dokumen	1.737.500,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Kota Bontang	1 Dokumen	9.932.272,00	Dana Umum (APBD)		1 Dokumen	10.111.498,00
Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Kota Bontang	2 Dokumen	10.934.822.107,00	Dana Umum (APBD)		14 Dokumen	11.155.163.819,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan Daftar gaji dan tunjangan	Kota Bontang	40 Orang	10.878.067.348,00	Dana Umum (APBD)		12 Dokumen	11.089.297.856,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Bontang	1 Dokumen	52.572.487,00	Dana Umum (APBD)		1 Dokumen	61.900.963,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang	1 Dokumen	4.182.272,00	Dana Umum (APBD)		1 Dokumen	3.965.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	Kota Bontang	100 %	60.000.000,00	Dana Umum (APBD)		100 %	111.195.758,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	Kota Bontang	- Stel				95 Stel	26.282.258,00

Rencana Kerja Bapenda Tahun 2022

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Perkiraan Maju Kencana tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kota Bontang	5 Orang	60.000.000,00	Dana Umum (APBD)		8 Orang	84.913.500,00		
Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Bulan	Kota Bontang	12 Bulan	591.170.000,00	Dana Umum (APBD)		12 Bulan	683.073.461,00		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan	Kota Bontang	4 Jenis	15.000.000,00	Dana Umum (APBD)		4 Item	24.301.414,00		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bontang	7 Jenis	100.000.000,00	Dana Umum (APBD)		9 Jenis	161.989.870,00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik/sembako	Kota Bontang	13 Item	70.000.000,00	Dana Umum (APBD)		10 Item	62.329.478,00		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis penyediaan cetakan dan penggandaan	Kota Bontang	8 Item	30.000.000,00	Dana Umum (APBD)		7 Item	46.412.091,00		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	Kota Bontang	1.200 Eksemplar	8.400.000,00	Dana Umum (APBD)		1.400 Eksemplar	9.100.000,00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kota Bontang	56 Kali	367.770.000,00	Dana Umum (APBD)		52 Kali	378.940.608,00		
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pengadaan mebelair	Kota Bontang	2 Jenis	15.000.000,00	Dana Umum (APBD)		3 Item	17.992.803,00		
Pengadaan Mebelair	Jumlah pengadaan mebelair	Kota Bontang	2 Jenis	15.000.000,00	Dana Umum (APBD)		3 Item	17.992.803,00		
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Bulan	Kota Bontang	12 Bulan	2.255.884.800,00	Dana Umum (APBD)		12 Bulan	2.086.566.427,00		
Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah materiail dan jasa pengiriman yang tersedia	Kota Bontang	600 Lembar	6.000.000,00	Dana Umum (APBD)		800 Lembar	8.000.000,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik, air dan internet	Kota Bontang	12 Bulan	355.410.000,00	Dana Umum (APBD)		12 Bulan	283.445.971,00		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah non pns dan tenaga kebersihan	Kota Bontang	48 Orang	1.894.474.800,00	Dana Umum (APBD)		60 Orang	1.795.120.456,00		

Rencana Kerja Bapenda Tahun 2022

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Dokumen Tahun 2023					Catatan Penting		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana							
1		2		3	4	5	6	7	8	9				
Pemerintahan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah Bulan		Kota Bontang	12 Bulan		258.133.750,00	Dana Umum (APBD)		12 Bulan	338.362.418,00				
	Jumlah unit kendaraan		Kota Bontang	33 Unit		193.133.750,00	Dana Umum (APBD)		33 Unit	279.122.685,00				
	Jumlah peralatan mesin yang dipelihara		Kota Bontang	5 Jenis		50.000.000,00	Dana Umum (APBD)		5 Jenis	35.926.227,00				
	Jumlah gedung yang dipelihara		Kota Bontang	2 Jenis		15.000.000,00	Dana Umum (APBD)		1 Gedung	23.313.506,00				
	Persentase Capaian PAD		Kota Bontang	100 %		3.914.962.075,00	Dana Umum (APBD)		100 %	2.941.828.183,00				
	Jumlah Bulan		Kota Bontang	12 Bulan		3.914.962.075,00	Dana Umum (APBD)		12 Bulan	2.941.828.183,00				
	Jumlah Media		Kota Bontang	8 Media		163.000.000,00	Dana Umum (APBD)		7 Media	170.000.000,00				
	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah		Kota Bontang	100 Unit		543.610.844,00	Dana Umum (APBD)		6 Jenis	309.913.414,00				
	Jumlah aplikasi		Kota Bontang	4 Aplikasi		200.000.000,00	Dana Umum (APBD)		4 Aplikasi	449.549.991,00				
	Jumlah wajib pajak		Kota Bontang	90 Wajib Pajak		50.000.000,00	Dana Umum (APBD)		200 Wajib Pajak	74.758.032,00				
Jumlah Penyampaian dan Validasi Data PBB		Kota Bontang	46.000 Wajib Pajak		430.000.000,00	Dana Umum (APBD)		30.000 Wajib Pajak	411.503.241,00					
Jumlah wajib pajak yang diperiksa		Kota Bontang	100 Wajib Pajak		150.000.000,00	Dana Umum (APBD)		150 Wajib Pajak	207.280.369,00					
Jumlah Wajib Pajak yang Tervalidasi		Kota Bontang	46000 Wajib Pajak Perusahaan		2.000.000.000,00	Dana Umum (APBD)		2.000 Wajib Pajak	789.518.147,00					
Jumlah wajib pajak		Kota Bontang	40 Wajib Pajak		50.000.000,00	Dana Umum (APBD)		40 Wajib Pajak	32.000.000,00					
Jumlah Peraturan Penyesuaian Tarif Pajak Daerah		Kota Bontang	1 Dokumen		328.351.231,00	Dana Umum (APBD)		1 Dokumen	497.304.989,00					
Jumlah Koordinasi Optimalisasi PAD			2 Dokumen					2 Kali						
Total						18.050.000.002,00				17.359.566.867,00				

BAB IV

PENUTUP

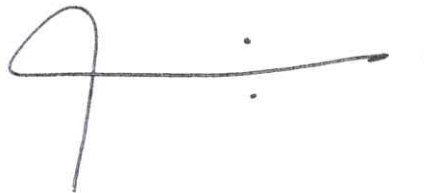
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 merupakan wujud dan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026. Rencana Kerja merupakan bagian tahapan dalam pelaksanaan suatu perencanaan dimana tujuan akhir yang diharapkan adalah adanya pedoman dan acuan dalam proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan,

Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang.

Demikian semoga dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah ini dapat menjadi acuan demi tercapainya tujuan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang.

Bontang, November 2021

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah



Rafidah, SE., M.Si
NIP. 197003232001122003